

ABSTRAK

Kedaulatan rakyat yang di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (2). Dalam skripsi ini membahas tentang implementasi kedaulatan rakyat yang diatur didalam UUD dalam konteks demokrasi, yang dimaksud dengan demokrasi ini yaitu berasal dari kata yunani yaitu “demos” dan “kratos” demos artinya rakyat sedangkan kratos artinya kekuasaan yang mana dapat diartikan bahwa demokrasi kekuasaannya berada ditangan rakyat. Tetapi pada masa ini tidaklah mungkin seluruh rakyat yang memegang kekuasaan atas negara maka yang dilaksanakan oleh negara adalah demokrasi dengan sistem perwakilan.

Di Indonesia kedaulatan rakyat berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 pasal 1 ayat (2) yang dilaksanakan oleh DPR melalui kinerja DPR yaitu seperti *Focus Group Discussion* (FGD), parlemen kampus dan parlemen remaja diilihat dari kinerja DPR yang melaksanakan kedaulatan rakyat belum maksimal karena belum merata dan masyarakat banyak yang tidak mengetahui karena DPR hanya mengadakan diskusi dan meminta pendapat dari masyarakat kampus yang dianggap ahli, dan juga dalam bentuk pembentukan perundang-undangan bahwasannya DPR mempunyai kewenangan untuk membentuk undang-undang sedangkan masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dengan cara-cara yang sudah ditentukan dan juga masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan tiga metode yaitu metode *Ante Legislative*, *Legislative* dan *Post Legislativ*.

Kata kunci : Kedaulatan rakyat, DPR, Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

ABSTRAK

Sovereignty of the people governed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (2). In this thesis discusses the implementation of people's sovereignty regulated in the Constitution in the context of democracy, what is meant by democracy is derived from the Greek words "demos" and "kratos" domos means the people while kratos means power which can be interpreted that democracy is in the hands of power people. But at this time it is not possible for all the people who hold power over the state to carry out by the state is democracy with a representative system.

In Indonesia, the sovereignty of the people based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 1945 Article 1 paragraph (2) carried out by the DPR through the performance of the DPR, such as Focus Group Discussion (FGD), campus and youth parliaments, is seen from the performance of the DPR which implements the people's sovereignty is not optimal because it is not evenly distributed and many people do not know because the DPR only holds discussions and solicits opinions from campus people who are considered experts, and also in the form of legislation formation that the DPR has the authority to form laws while the public can also participate in the formation of legislation by -the predetermined way and also the public can also participate with three methods namely the Ante Legislative, Legislative and Post Legislative methods.

Keywords: People's sovereignty, Parliament, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRAK</i>	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan.....	5
1.4 Kegunaan.....	5
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	9
1.6.1 Jenis Penelitian	10
1.6.2 Pendekatan Penelitian	10
1.6.3 Sumber Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	13
BAB II.....	14
TEORI KEDAULATAN DAN DEMOKRASI PERWAKILAN.....	14
2.1 Teori Kedaulatan	14
2.1.1 Sejarah Teori Kedaulatan.....	15
2.2 Teori Demokrasi.....	18

2.2.1	Asas Demokrasi	18
2.2.2	Konsep Perwakilan	20
2.3	Teori Pengendalian Negara	23
2.3.1	Pemerintahan	23
2.3.2	Asas Negara Indonesia.....	28
BAB III.....		34
PELAKSANAAN KEDAULATAN RAKYAT OLEH WAKIL RAKYAT DAN WUJUD PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....		34
3.1	Pelaksana Kedaulatan Rakyat.....	34
3.1.1	Kedaulatan Berdasarkan Konstitusi Indonesia	34
3.1.2	Partisipasi Masyarakat Dalam Kinerja DPR.....	42
3.2	DPR Sebagai Penampung Aspirasi dan Pengaduan	47
3.2.1	Bentuk Aspirasi Dan Pengaduan Kedaulatan Rakyat	47
3.2.2	Wujud Kedaulatan Rakyat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	54
BAB IV		61
PENUTUP		61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	62
<i>Daftar Pustaka</i>		63